



Awasi WFH ASN Tiap Jumat

Kebijakan bekerja dari rumah setiap Jumat dinilai tidak ideal karena dikhawatirkan berubah menjadi libur panjang. Untuk itu, implementasinya perlu disertai evaluasi berkala dan ketat.

JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* bagi aparat sipil negara setiap Jumat perlu diawasi ketat agar tidak menurunkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Setiap pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan instansi pemerintah diingatkan untuk mengevaluasi secara berkala, memastikan kinerja para pegawainya.

Di sela-sela mendampingi lautan Presiden Prabowo Subianto di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan kebijakan *work from home* (WFH) bagi aparat sipil negara (ASN), sehari sepekan. Jumat dipilih menjadi hari untuk menerapkan kebijakan itu, berlaku mulai April 2026.

"Penerapan *work from home* bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," katanya.

Detail pelaksanaannya diatur melalui surat edaran yang akan diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widayanti serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mekanisme WFH juga diyakini bakal ikut mendorong transformasi tata kelola berbasis digital.

Terpisah, Rini menjamin implementasi kebijakan ini akan diawasi ketat agar produktivitas ASN tetap terjaga. Setiap pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi secara berkala.

Ia mengingatkan, fleksibilitas kerja tidak boleh sampai menurunkan disiplin dan capaian kinerja ASN. "Dengan penyesuaian pola kerja ini, pengawasan akan semakin ketat. Kinerja ASN harus tetap terukur, akuntabel, dan berbasis *output*," katanya, Rabu (1/4/2026).

Pemanfaatan sistem informasi di lingkungan instansi masing-masing, serta penggunaan sistem informasi berbagai pakai di tingkat nasional, termasuk untuk bukti kehadiran dan pelaporan kinerja ASN, menurut Rini, menjadi kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, sejauh ini ASN yang sudah aktif mengisi aplikasi penilaian kerja harian melalui e-kinerja baru 16,7 persen. Adapun ASN yang menggunakan e-kinerja bulanan sudah mencapai 98 persen.

Hal tersebut menurut dia tidak menjadi masalah dan BKN terus mendorong instansi agar ASN di lembaga masing-masing rutin mengisi kinerja harian demi menjaga produktivitas. "Jadi, yang sudah menggunakan e-kinerja bulanan tinggal kita dorong menggunakan e-kinerja harian," ucapnya.

Selama setahun terakhir, BKN telah mendesain sistem e-kinerja harian bagi semua ASN. Sejak Kementerian PAN RB menerbitkan peraturan mengenai fleksibilitas kerja, BKN langsung menyesuaikan sistem dan instrumen pendukungnya.

"Kami punya pengalaman saat pandemi Covid-19, *work from*

home. Jadi, sekarang kami tinggal memperbaiki berbagai sistemnya," ucapnya.

Implementasi di daerah

Pemerintah DI Yogyakarta telah menerima surat edaran dari pemerintah pusat tentang penerapan kebijakan bekerja WFH bagi ASN. Namun, pelaksanaannya di lingkup Pemerintah DIY masih menunggu penghitungan jumlah pegawai yang dimungkinkan untuk menerapkan skema itu.

"Kami masih identifikasi. Kalau bisa diterapkan minggu ini, kami akan langsung terapkan. Tapi, supaya tidak terburu-buru, bisa minggu depan," ujar Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menerima surat edaran dari pemerintah pusat dan akan mengadopsi kebijakan itu. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menilai, penerapan WFH setiap Jumat efektif karena jam kerja pada hari itu terbilang pendek karena ada jeda shalat Jumat.

Kini, Pemprov Jateng sedang menyiapkan siapa-siapa saja ASN yang bisa melakukan WFH dan tidak. Sejauh ini, ASN yang bekerja di pelayanan umum, rumah sakit dan puskesmas, samsat, serta dinas-dinas yang pekerjaannya memerlukan kegiatan tatap muka dengan masyarakat diputuskan tidak melakukan WFH. Para pejabat tinggi madya dan pratama juga tidak boleh WFH.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan WFH, kemarin. Gu-

bernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan, penerapan WFH bukanlah bentuk pelanggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntun kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN. Hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dinilai paling ideal dalam menjaga ritme kerja sekaligus menghindari potensi peningkatan konsumsi BBM.

BBM kendaraan dinas

Selain penerapan WFH, Pemerintah Kota Yogyakarta juga membatasi belanja BBM mobil dinas maksimal 5 liter per hari dan sepeda motor 1 liter per hari. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, dengan menerapkan kebijakan itu, belanja BBM Pemkot Yogyakarta bisa ditekan 30 persen.

Apabila ada kendaraan dinas yang konsumsi BBM-nya melebihi jatah, kelebihan biayanya harus ditanggung sendiri oleh pegawai pengunanya.

Di Surabaya, Jatim, Pemkot tidak hanya menerapkan WFH dan WFA (*work from anywhere*), tetapi juga meminta ASN setidaknya setiap Jumat untuk bersepeda atau menggunakan angkutan umum perkotaan menuju tempat kerja.

Imbauan bersepeda ditujukan bagi aparat dengan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kantor. Apalagi, jika aparat bekerja di kelurahan atau kecamatan.

"Dengan begitu, yang lokasi kerjanya amat dekat bisa jalan kaki, yang sedikit lebih jauh, ya,

bersepeda," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Pengawasan

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Khozin, menilai, WFH setiap Jumat merupakan pilihan yang tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi libur panjang. Untuk itu, ia berharap penerapan WFH setiap Jumat ini disertai dengan evaluasi berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta pemda.

"Pastikan penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik," katanya.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, juga menilai, kebijakan WFH tidak efektif untuk mengatasi potensi darurat energi global dalam jangka pendek. Menurut dia, terdapat opsi kebijakan jangka pendek yang dapat ditempuh, yakni pembatasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 120 triliun per tahun.

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sejatinya sudah coba diterapkan sat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun, kebijakan tersebut belum diterapkan secara efektif mengingat penggunaan aplikasi MyPertamina belum optimal.

(ENG/XTI/BRO/NIK/
WER/BOW)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005